
**MANAJEMEN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PADANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) DI
KOTA PADANG**

Cynthia Aprilla Sari¹, Roni Ekha Putera², Kusdarini³

^{1,2,3}Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas

Email: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh turunnya peringkat IPLM Kota Padang dari tahun ke tahun. Perolehan nilai IPLM Kota Padang pada tahun 2023 tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Kinerja yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam upaya meningkatkan IPLM di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan terkait Manajemen Kinerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan teknik purposive sampling yang didukung dengan dokumentasi, dan observasi kegiatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen Kinerja Wibowo, yang terdiri dari empat variabel, yaitu Masukan, Proses, Keluaran, dan Manfaat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah melaksanakan manajemen kinerja pada upaya meningkatkan IPLM di Kota Padang. Perencanaan sudah dilakukan dengan baik berpedoman pada RPJMD meskipun masih terdapat beberapa kekurangan input dalam mendukung pelaksanaan kinerja. Adanya keterbatasan alokasi anggaran APBD sehingga mempengaruhi pelaksanaan kinerja dan hasil kinerja. Kegiatan peningkatan IPLM memberikan dampak positif bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sendiri maupun masyarakat. IPLM memperkuat keberadaan perpustakaan dan pengelolaan yang lebih baik, sekaligus menjadi penggerak utama literasi berkelanjutan.

Kata kunci: Manajemen Kinerja; IPLM; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PENDAHULUAN

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta aksara dan meluaskan akses pendidikan sayangnya belum diikuti dengan keberhasilan dalam mengembangkan budaya literasi masyarakat Indonesia. Kegiatan pembudayaan literasi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pembukaan dari UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Literasi menjadi faktor pembentuk yang sangat penting dalam rangka membentuk pondasi yang kokoh dalam mewujudkan Masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.

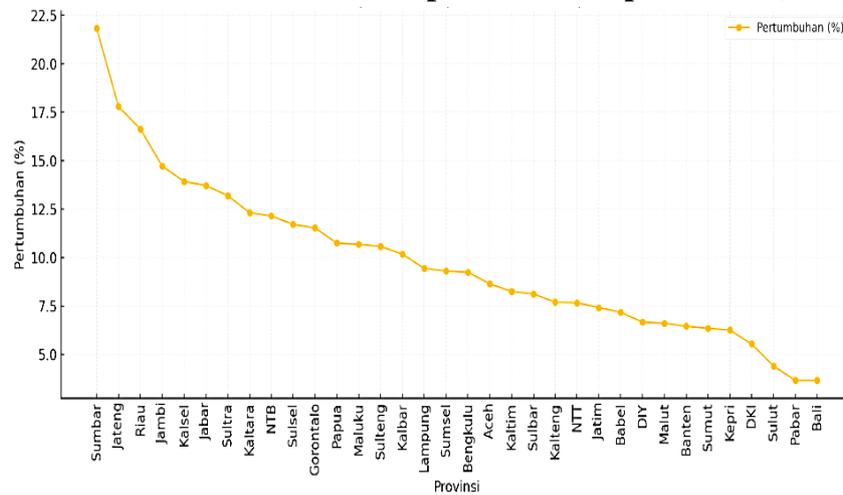
Perpustakaan semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap hanya berisikan informasi yang sudah kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman (Lilie Soedjati, 2015). Indonesia memiliki 164.610 perpustakaan sehingga menjadi negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua setelah India, namun pembangunan literasi di seluruh wilayah Indonesia masih belum merata. Hal ini dikarenakan hanya 11.484 perpustakaan (6,9%) di Indonesia yang sudah memenuhi standar nasional (Adin Bondar, 2022). Ketimpangan ini menuntut upaya afirmasi dan akselerasi bagi pemerintah dalam peningkatan mutu perpustakaan serta pemerataan akses literasi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pentingnya penguatan literasi di Indonesia dijawab dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 Tahun 2020 dimana setiap pemerintah berkewajiban menyerahkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan, termasuk di bidang perpustakaan. IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan salah satunya yaitu Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Perpustakaan Republik Indonesia sebagai lembaga non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden menjadikan sasaran strategis “mewujudkan Pembangunan literasi dan kegemaran membaca” dalam renstra Perpustakaan RI periode tahun 2020-2024.

Karakteristik penilaian IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pada penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Pada era disrupsi 4.0 ini perpustakaan harus berevolusi kepada penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi. Menanggapi hal ini, Perpunas sebagai Lembaga linear melakukan sensus untuk melihat capaian pertumbuhan data dari perpustakaan di Indonesia pada tahun 2022-2023. Seperti yang terdapat pada grafik berikut.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perpustakaan Tiap Provinsi (2022-2023)



Sumber: Data Perpunas, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan urutan pertama pertumbuhan perpustakaan di Indonesia. Meskipun jumlah perpustakaan di Sumatera Barat belum sebanyak perpustakaan di Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Sumatera Barat telah meningkatkan perhatian pada pengembangan perpustakaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan pendidikan masyarakat.

Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang berpotensi menjadi kontributor utama dalam peningkatan jumlah perpustakaan di provinsi ini. Hal ini selaras dengan Visi Walikota Padang yang tercantum dalam RPJMD, yaitu “Mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul berdaya saing”. Visi tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu sasaran utama dalam rencana pembangunan Kota Padang. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Adanya keseriusan pemerintah daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan perpustakaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpustakaan. Dimana dengan peraturan ini memastikan pemerataan layanan perpustakaan sehingga tercipta akses yang lebih merata terhadap sumber belajar dan pengetahuan sepanjang hayat bagi semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain, berdasarkan data rekapitulasi IPLM selama tiga tahun terakhir, Kota Padang mengalami penurunan peringkat. Seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Peringkat IPLM Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai IPLM	Peringkat
2021	37,45	2
2022	77,94	6
2023	72,49	9

Sumber: Laporan Hasil Kajian IPLM Perpusnas, 2023

Dari tabel 1.1 terjadi penurunan peringkat secara konsisten selama tiga tahun terakhir, dari posisi 2 pada 2021, turun ke 6 pada 2022, dan semakin menurun ke 9 pada 2023, meskipun ada peningkatan signifikan dalam nilai IPLM dari tahun 2021 ke 2022. Hal mengindikasikan adanya dampak positif dari program literasi atau perbaikan fasilitas perpustakaan di Kota Padang. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan nilai IPLM menjadi 72,49, yang menunjukkan adanya tantangan pemerintah Kota Padang dalam mempertahankan laju peningkatan pembangunan literasi. Rincian masing-masing unsur IPLM Kota Padang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Rincian IPLM Kota Padang tahun 2023

UPLM	Nilai	Interpretasi
UPLM 1	0,7793	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 77 persen dari standar
UPLM 2	0,6581	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 65 persen dari standar
UPLM 3	1	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
UPLM 4	0,4841	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 48 persen dari standar
UPLM 5	0,4479	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 44 persen dari standar
UPLM 6	0,7047	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 70 persen dari standar
UPLM 7	1	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar

Sumber: Laporan Akhir Kajian IPLM, 2023

Berdasarkan data ketujuh Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM), terdapat dua unsur capaian IPLM Kota Padang tahun 2023 yang masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Perpustnas. UPLM-4 yang mencakup tingkat kunjungan masyarakat per hari hanya mencapai sebesar 48 persen dari standar, dan UPLM-5 yang menunjukkan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebesar 44 persen dari standar (Perpustnas RI, 2023). Disamping itu, terdapat perubahan cara mengukur IPLM 2023 dengan tahun sebelumnya.

Dalam memastikan laju pembangunan literasi masyarakat di Kota Padang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai peran penting dalam membina dan mendata seluruh perpustakaan di Kota Padang (Pedoman Pengukuran IPLM, 2021). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sebagai penyedia layanan perpustakaan untuk menjangkau masyarakat di Kota Padang. Dalam mencapai pemerataan akses terhadap layanan perpustakaan di Kota Padang dituangkan dalam berbagai program kegiatan yang membutuhkan suatu siklus manajemen kinerja yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik melalui kinerja tim maupun individu dengan menetapkan tujuan, sasaran, dan standar untuk kepentingan organisasi.

Banyak tantangan yang harus dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam meningkatkan IPLM. Salah satu tantangan tersebut terkait dengan siklus manajemen kinerja, yang diawali dengan adanya masukan berupa sumber daya sebagai penunjang pelaksanaan kinerja. Namun, berdasarkan data awal yang ditemukan, dukungan sumber daya yang tersedia bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan berbagai program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan literasi di Kota Padang.

Berdasarkan data Realisasi dan Capaian kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2023, capaian kinerja untuk IPLM menunjukkan angka 72,49% dari target 76%, atau sekitar 95% dari target yang telah ditetapkan (Laporan Kinerja Pemerintah Dispusip, 2023). Meskipun capaian ini menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan pembangunan literasi, namun dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, terjadi penurunan yang mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja.

Fenomena yang telah dipaparkan di atas melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini guna mengkaji lebih lanjut mengenai Manajemen Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Padang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kinerja yang dilakukan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Lexy Moleong menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Sementara tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk memaparkan data selama penelitian secara sistematis dan akurat secara apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana Manajemen Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang digunakan dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik orang dalam pemberian informasi (Pasolong, 2010). Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis Manajemen Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam Upaya Meningkatkan IPLM di Kota Padang

menggunakan teori Manajemen Kinerja Wibowo, yang terdiri dari 4 variabel, yaitu Masukan, Proses, Keluaran, dan Manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masukan

Masukan merupakan dasar untuk proses yang berkelanjutan dalam sistem manajemen kinerja (Wibowo, 2007). Masukan yang diperlukan adalah dalam bentuk tersedianya sumber daya manusia baik secara individu maupun tim. Disamping itu, juga dibutuhkan dukungan dari sumber daya lainnya, yakni sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, maupun mekanisme kerja yang mendukung kinerja.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program peningkatan pembangunan literasi di Kota Padang. Sasaran yang hendak dicapai pada pelaksanaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang adalah untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan di Kota Padang. SDM mencakup ketersediaan tenaga kerja yang memadai serta kompetensi yang sesuai untuk mendukung pengelolaan perpustakaan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dari sejumlah aparatur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dan analisis data yang ditemukan, dapat diketahui bahwa ketersediaan SDM di Dispusip Kota Padang masih belum memadai dari kurangnya SDM untuk mendukung kegiatan operasional lapangan dan kurangnya SDM yang memiliki latarbelakang pustaka. Disamping itu, masih terdapat distribusi SDM yang belum sesuai karena memiliki tugas ganda diluar tugas utamanya sebagai pustakawan.

b. Anggaran

Menurut Wibowo anggaran merupakan bentuk Input (masukan) dari manajemen kinerja. Anggaran dalam konteks manajemen kinerja merujuk pada aspek keuangan atau pendanaan yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program organisasi (Wibowo, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, terlansir bahwa tidak ada anggaran untuk kegiatan pendataan IPLM yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunjang IPLM masih ada anggaran yang bersumber dari APBD kota, tetapi kurang dan terbatas. Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang berupaya mencapai target IPLM dengan mengandalkan dukungan dari pihak luar, seperti DPRD dan Perpunas RI. Dari total anggaran APBD untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang pada tahun 2023 sebesar 5.594.742.564, hanya 4,8% anggaran yang dialokasikan untuk Program Pembinaan yang termasuk kegiatan peningkatan IPLM di dalamnya. Meskipun Visi Walikota tertuju pada pendidikan, tetapi pemerataan perpustakaan belum menjadi prioritas alokasi anggaran dari APBD Kota Padang.

c. Sarana Prasarana dan Teknologi

Sarana prasarana dan teknologi adalah bentuk sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk proses input/masukan pada manajemen kinerja yang turut menentukan kinerja organisasi (Wibowo, 2007). Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Padang juga dipengaruhi oleh sarana, prasarana dan teknologi.

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara dan analisis data, dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Dispusip Kota Padang masih kurang memadai. Meskipun ada beberapa upaya peningkatan pada fasilitas tertentu, keterbatasan anggaran mengakibatkan penurunan atau stagnasi di beberapa kategori sarana dan prasarana, khususnya aset bergerak. Selain itu, gedung perpustakaan umum yang dimiliki juga belum sesuai dengan standar Perpustakaan Kota. Namun, di sisi lain Dispusip Kota Padang telah memanfaatkan teknologi dengan baik melalui penggunaan berbagai platform media sosial sebagai sarana promosi.

d. Mekanisme Kinerja

Mekanisme kerja adalah proses dan cara organisasi menggambarkan alur pelaksanaan tugas arparatur dalam suatu Sistem. Berdasarkan temuan di atas, Mekanisme kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah memiliki dasar yang cukup baik melalui SOP pembinaan dan layanan perpustakaan, serta pedoman dari Perpusnas untuk IPLM. Namun, mekanisme kerja untuk mendukung peningkatan IPLM belum sepenuhnya optimal karena belum tersedianya SOP atau SK khusus yang secara spesifik mengatur pelaksanaan IPLM. Selain itu, Dispusip masih mengandalkan pedoman umum dari Perpusnas untuk pengukuran IPLM, tanpa adanya peraturan daerah yang lebih relevan. Meskipun demikian, dukungan regulasi, seperti Surat Edaran Walikota dan landasan hukum berupa UU No. 43 Tahun 2007 serta Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2018, menjadi pedoman yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat mekanisme kerja dalam mencapai tujuan.

2. Proses

Manajemen kinerja menurut Wibowo, mencakup proses berkesinambungan yang berkaitan tentang bagaimana kinerja itu dijalankan sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik (Wibowo, 2016). Proses pada manajemen kinerja menjadi serangkaian proses perencanaan, kemudian rencana tersebut dilaksanakan dan diiringi dengan monitoring dan pengukuran atas kemajuan yang telah dicapai

a. Perencanaan

Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting sekaligus titik awal dari manajemen kinerja. Dasar dalam melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Manajemen kinerja diawali dengan merencanakan tujuan yang diharapkan di masa depan, menyusun sumber daya, dan kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah arparatur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dan analisis data, ditemukan bahwa perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah baik. Perencanaan kerja dilakukan dengan mengacu tujuan dan sasaran Dispusip Kota Padang yang termuat dalam

Renstra lima tahun dan berpedoman kepada RPJMD. Dalam merencanakan kegiatan, Dinas menyesuaikan prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran, sehingga jika anggaran terbatas, beberapa kegiatan harus dipotong atau dialihkan ke program yang lebih mendesak. Selain itu, setiap kegiatan memiliki target yang disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia.

b. Pelaksanaan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi kinerja yang berlangsung baik di dalam maupun di luar organisasi. Pelaksanaan kinerja merupakan tahap dimana semua rencana kerja yang telah disusun dilaksanakan (Wibowo, 2016)

Berdasarkan hasil temuan data dari wawancara dengan sejumlah Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang yang didukung dengan data tambahan dari pihak luar yang berhubungan, terungkap bahwa masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan kinerja dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Padang. Masih terdapat ketidaksepahaman antar aparatur mengenai IPLM. Sementara itu, kegiatan lapangan dalam pembinaan belum dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, serta kegiatan pendataan IPLM yang masih kurang maksimal karena kurangnya dukungan kemampuan SDM. Selain itu, pada kegiatan lainnya seperti sosialisasi pelatihan pustakawan dan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat pada IPLM ke-6 masih belum bisa terlaksana karena kekurangan anggaran.

c. Monitoring

Menurut Wibowo, monitoring merupakan bagian yang terpenting dari manajemen kinerja, hal ini dikarenakan manajemen kinerja merupakan suatu siklus yang tidak akan berhenti. Untuk itu perlu pemantauan dari pimpinan guna mengetahui adanya penyimpangan dari tujuan awal yang telah ditetapkan (Wibowo, 2007).

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dalam meningkatkan kinerja, terutama terkait dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Kepala Dinas

maupun Kepala Bidang aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja secara langsung. Monitoring ini dilaksanakan dalam bentuk rapat yang diadakan dua kali dalam sebulan. Disamping itu, masing-masing kepala bidang juga berperan aktif memantau kinerja staf bidangnya. Kemudian juga penggunaan teknologi dalam pemantauan kehadiran dan kinerja pegawai menandakan adanya upaya modernisasi dalam manajemen sumber daya manusia. Monitoring yang dilakukan termasuk penekanan pada pengembangan staf melalui pemberian sertifikat kepada pegawai yang berprestasi.

d. Pengukuran Kinerja

Wibowo menekankan pentingnya pengukuran kinerja guna memantau apakah pelaksanaannya mengalami penyimpangan dari rencana yang sudah disusun, apakah pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk melaksanakan pengukuran ini, diperlukan kemampuan yang memadai dalam melakukan pengukuran kinerja, sehingga proses pengukuran tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja (Wibowo, 2007).

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara peneliti dengan beberapa informan maupun triangulasi, terungkap bahwa pengukuran kinerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang pada tahun 2023 sudah cukup baik didukung oleh aplikasi e-kinerja sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih efisien dan akuntabel. Meskipun pengukuran berdasarkan aplikasi e-kinerja ini masih berdasarkan kuantitas yang telah dilaksanakan oleh pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Sedangkan pada pengukuran kinerja menurut Wibowo, terdapat 5 aspek yang diukur mulai dari produktifitas, kualitas kinerja, Ketepatan waktu, *cycle time*, dan pemanfaatan sumber daya dan biaya. Berdasarkan kelima aspek tersebut, ukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah cukup baik pada produktifitas, sementara pada aspek lainnya masih kurang optimal pada pelaksanaannya.

3. Keluaran

Menurut Wibowo, keluaran merupakan hasil yang terukur dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dengan kata lain, keluaran merupakan hasil jangka pendek yang bisa dilihat dari aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi (Wibowo, 2016). Dalam penelitian ini, hasil keluaran diketahui dari tercapainya target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

a. Hasil Kerja

Menurut Wibowo, variabel output menjadi bagian yang penting dalam mengevaluasi kinerja. Hal ini dikarenakan output menggambarkan tentang efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Keluaran dari organisasi bisa melebihi atau kurang dari target yang telah ditentukan. Hasil kerja perlu dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan organisasi untuk dicapai.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dari sejumlah wawancara dan analisis data, ditemukan bahwa hasil kerja Dispusip dari target Kinerja yang telah ditetapkan sudah mencapai hasil yang baik yang telah sesuai target. Namun, untuk target strategis IPLM sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang masih belum tercapai. Meskipun Dinas Perpustakaan sudah melakukan berbagai macam upaya inovasi dan kegiatan tambahan untuk meningkatkan output, tetapi hal-hal eksternal masih belum bisa sepenuhnya dikendalikan. Adanya ketidaksesuaian dengan sasaran kinerja yang ditargetkan, Dispusip melakukan upaya-upaya perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan input untuk tahun kedepannya.

4. Manfaat

Manfaat merupakan pengaruh meluas dari output yang telah dicapai organisasi. Dalam hal ini manfaat yang diperoleh dalam upaya meningkatkan IPLM di Kota Padang dirasakan oleh Pihak Dinas Perpustakaan sebagai Pembina dan masyarakat maupun pengelola perpustakaan di Kota Padang sebagai pihak yang terdampak dari berbagai macam program IPLM.

a. Dampak

Dampak kinerja suatu organisasi merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari luar produk atau keluaran langsung kinerja. Disamping itu,

dampak juga merupakan pengaruh meluas dari hasil kinerja organisasi. IPLM merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perpustakaan, dimana hasil ini dilakukan untuk menilai bagaimana kinerja dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan dan budaya literasi di Kota Padang. Pembinaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang membantu pustakawan memahami standar nasional, memperbaiki administrasi, dan mempersiapkan akreditasi, yang juga membuka akses ke dukungan Perpustakaan Nasional. Selain itu, IPLM mendorong inovasi, seperti program penghargaan bagi pengunjung aktif, yang meningkatkan minat baca anak-anak. Sebagai indikator kinerja kunci (IKK), IPLM memotivasi pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan literasi, termasuk melalui kebijakan wajib perpustakaan di setiap instansi. Dampak ini terlihat pada pengelolaan perpustakaan yang lebih baik dan peningkatan antusiasme masyarakat terhadap literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga turut merasakan dampak positif dari IPLM dengan mendapatkan interaksi lebih intens dengan pihak Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pusat dari perpustakaan seluruh Indonesia. IPLM bukan hanya alat ukur kinerja, tetapi juga penggerak utama literasi yang berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data yang peneliti dapatkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah melaksanakan manajemen kinerja pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Padang dengan cukup baik. Hal ini berdasarkan adanya penerapan dari setiap tahapan manajemen kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IPLM meski masih terdapat beberapa kekurangan pada masing-masing variabel Manajemen Kinerja.

Kurangnya Masukan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana sangat mempengaruhi pelaksanaan kinerja dan hasil kinerja. Dispusip melakukan upaya

perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan input untuk tahun kedepannya. Pada pelaksanaan program memberikan dampak positif baik bagi Dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Padang sendiri, maupun juga dari pengelola perpustakaan dan masyarakat yang merasakan dampak dari pelaksanaan program kegiatan peningkatan IPLM dari Dispusip Kota Padang.

DAFTAR RUJUKAN

- Bondar, Adin. (2022). “Indikator Pemerintah Urusan Perpustakaan”, Kompasiana.<https://www.kompasiana.com/adinbondar.kompasiana.com/629094f0ce96e54f49464f92/indikator-urusan-pemerintah-bidang-perpustakaan>. Diakses Pada 8 Maret 2024
- Harbani Pasolong. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2023
- Moleong. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda
- Soedjati, Liliek. (2015). “Pengguna Perpustakaan Di Era Digital Dalam Perspektif Fenomenologi”. Jurnal Metafora, Volume 2, Nomor 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Perpusnas RI. (2021). Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Jakarta: Perpusnas PRESS
- Perpusnas RI. (2023). Laporan Akhir Kajian IPLM. Jakarta: Perpusnas Press
- Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada
- Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada.